



# Pengaruh Profitabilitas, Kebijakan Dividen dan *Corporate Governance* Pada Penghindaran Pajak Di Perusahaan Sektor Pertambangan Indonesia Yang Tercatat Di Bei Periode 2021 – 2024

Sylvia Tri Utami<sup>1</sup>, Mujiyati<sup>2\*</sup>

<sup>1,2</sup>Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

Correspondence: E-mail: [b200220026@student.ums.ac.id](mailto:b200220026@student.ums.ac.id)<sup>1</sup>, [mujiyati@ums.ac.id](mailto:mujiyati@ums.ac.id)<sup>2\*</sup>

## ABSTRACT

Penghindaran pajak ialah cara yang dijalankan perusahaan guna menekan beban pajak dengan menggunakan kekosongan suatu peraturan, akan tetapi masih berada dalam batas hukum yang berlaku. Studi ini ditujukan untuk memahami pengaruh profitabilitas, kebijakan dividen, dan corporate governance pada praktik penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama interval 2021–2024. Metode studi ini ialah berjenis kuantitatif dengan memanfaatkan data yang bersifat sekunder yakni data yang didapat dari laporan tahunan perusahaan, baik dari website resmi BEI maupun website masing-masing perusahaan. Sampel studi ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, sedangkan analisa data dengan regresi linear berganda. Temuan studi memperlihatkan, kebijakan dividen serta keberadaan komisaris independen mempunyai pengaruh pada penghindaran pajak. Sementara itu, kualitas audit eksternal, profitabilitas, serta komite audit tidak menunjukkan pengaruh yang berarti. Temuan ini menunjukkan bahwa keputusan pembagian dividen dan efektivitas fungsi pengawasan dewan, khususnya komisaris independen, menjadi faktor yang lebih menentukan dalam menjelaskan praktik penghindaran pajak di perusahaan pertambangan di Indonesia. Implikasi studi ini penting bagi investor, manajemen, dan regulator nasional untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan dan perbaikan tata kelola perusahaan.

© 2026 Kantor Jurnal dan Publikasi UPI

## ARTICLE INFO

### Article History:

Submitted/Received 23 April 2026

First Revised 24 April 2026

Accepted 25 April 2026

First Available online 28 April 2026

Publication Date 28 April 2026

### Keyword:

*Corporate Governance, Kebijakan Dividen, Penghindaran Pajak, Perusahaan Pertambangan, Profitabilitas.*

## 1. PENDAHULUAN

Penghindaran pajak ialah suatu bentuk tindakan yang dilaksanakan guna meminimalkan adanya beban pajak. Penghindaran pajak di suatu badan usaha umumnya dilakukan dengan berbagai upaya, yakni dengan mengurangi kewajiban pajak perusahaan atau dengan tetap mempertahankan keuntungan sehingga mempunyai angka ETR yang lebih kecil (Wulandari & Stiawan, 2023). Dengan mengurangi kewajiban pajak, perusahaan memperoleh fleksibilitas keuangan yang lebih besar untuk mendanai kegiatan operasional, investasi, maupun ekspansi usaha.

Tindakan menghindari pajak biasanya dijalankan secara legal melalui kekosongan regulasi perpajakan dan hal ini dapat berdampak negatif terhadap penerimaan negara. Tindakan menghindari pajak ini dapat memberikan kerugian bagi negara dikarenakan dapat mengurangi jatah penerimaan pajak yang seharusnya diperoleh, walaupun dampak ini tidak secara langsung menyebabkan kerugian bagi perekonomian negara tetapi dapat menghambat pendanaan berbagai program pembangunan nasional, seperti pembangunan infrastruktur, sektor pendidikan, dan layanan kesehatan (Sulaiman & Yusuf, 2024). Dalam jangka panjang, praktik ini turut melemahkan kapasitas fiskal negara dan memperbesar ketimpangan beban pajak antarwajib pajak. Perusahaan yang patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan dapat merasakan ketidakadilan ketika mengetahui adanya pihak lain, baik badan usaha ataupun individu, yang tidak menjalankan kewajibannya, tetapi tetap memperoleh manfaat dari berbagai fasilitas negara (Sulaiman & Yusuf, 2024). Kondisi tersebut menimbulkan ketidakadilan dalam sistem perpajakan serta berdampak pada penurunan kepatuhan pajak.

Profitabilitas ialah rasio yang dipergunakan untuk menilai efektivitas manajemen badan usaha atau perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari laba atau tingkat keuntungan yang didapatkan, baik yang berkaitan dengan investasi maupun penjualan. (Tanjaya & Nazir, 2021). Perusahaan yang mempunyai keuntungan tinggi umumnya memiliki sumberdaya yang lebih banyak guna memanfaatkan jasa konsultan pajak, serta menerapkan berbagai strategi perpajakan yang lebih kompleks untuk menekan kewajiban pajak yang harus dibayar. Sebaliknya, badan usaha dengan profitabilitas rendah memiliki kecenderungan untuk berhati-hati ketika melakukan penghindaran pajak karena terbatasnya sumber daya serta adanya potensi sanksi dari otoritas perpajakan.

Kebijakan dividen adalah penetapan perusahaan terkait besarnya laba yang dibagikan kepada para pemegang saham serta bagian laba yang ditahan untuk digunakan kembali dalam kegiatan investasi. Jika dividen yang dibagi kepada pemegang saham semakin besar, berarti keuntungan yang disimpan menjadi lebih sedikit sehingga pertumbuhan perusahaan cenderung melambat. Sebaliknya, jika lebih banyak keuntungan yang disimpan guna mendukung perkembangan perusahaan, maka jumlah dividen yang dibagi akan semakin sedikit (Lestari & Djohar, 2023).

*Corporate governance* berperan untuk mengendalikan kebijakan pajak yang diterapkan oleh perusahaan. Perusahaan yang mempunyai sistem pengelolaan atau manajemen yang baik diharapkan mempunyai keterbukaan yang lebih besar dan mengutamakan kepatuhan pajak sebagai bagian dari etika bisnis. Sebaliknya, lemahnya pengawasan dari manajemen dan pemegang saham dapat meningkatkan risiko adanya tindakan penghindaran pajak yang agresif.

Komisaris independen mempunyai peran pengawasan karena termasuk pihak eksternal yang tidak mempunyai keterkaitan afiliasi dengan pemegang saham maupun manajemen (Nuryanasari & Fauzan, 2025). Keberadaan komisaris independen pada formasi keanggotaan dewan komisaris diyakini mampu meminimalisir adanya praktik penghindaran pajak melalui pengawasan dalam perencanaan pajak dan pengambilan keputusan perpajakan.

Kualitas audit eksternal juga menjadi indikator penting dalam corporate governance. Audit eksternal yang dilakukan oleh KAP yang bereputasi baik lebih mempunyai tolok ukur atau ketentuan pemeriksaan dengan independensi yang kuat dan ketat. Kualitas audit yang baik dapat menumbuhkan kredibilitas laporan keuangan serta mengurangi kemungkinan terjadinya manipulasi laba atau rekayasa transaksi yang bertujuan untuk meminimalkan beban pajak. Maka dari itu, badan usaha yang memperoleh audit dari auditor kompeten cenderung bertindak menghindari pajak atau lebih rendah dalam melakukan penghindaran pajak.

Komite audit bertugas mendukung dewan komisaris dalam menjaga agar pengendalian internal terlaksana secara efektif, laporan keuangan berkualitas baik, serta perusahaan mematuhi peraturan yang berlaku, termasuk ketentuan perpajakan. Di samping itu, komite audit memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap risiko-risiko yang berkaitan dengan perpajakan serta mencegah terjadinya praktik penghindaran pajak yang bersifat agresif (Purnomo & Eriandani, 2022).

### **Teori Kepatuhan Pajak**

Teori kepatuhan pajak ialah teori yang menekankan bagaimana dan mengapa individu atau perusahaan memutuskan untuk patuh atau menghindari pajak. Salah satu model utama dalam teori ini dikembangkan oleh (Allingham & Sandmo, 1972), yang mengemukakan bahwa wajib pajak mempertimbangkan manfaat dan risiko dalam keputusan perpajakannya. Pada studi ini, teori kepatuhan pajak relevan untuk menguraikan bagaimana profitabilitas badan usaha dapat mempengaruhi keputusan dalam melakukan strategi penghindaran pajak.

### **Teori Agensi**

*Agency theory* yang dikembangkan oleh Jensen & Meckling, (2019) menjabarkan potensi konflik kepentingan antara *agent* (manajer) dengan *principal* (perusahaan). Pada pembahasan terkait perpajakan, manajer yang bertindak selaku agen dapat memiliki kepentingan pribadi untuk meminimalkan beban pajak guna mengembangkan performa finansial jangka pendek, meskipun praktik ini bisa berdampak negatif bagi perusahaan dalam jangka panjang.

### **Penghindaran Pajak**

*Tax avoidance* ialah tindakan yang dilakukan suatu perusahaan atau badan usaha guna menekan jumlah pajak yang wajib dibayarkan dengan menggunakan celah atau kekosongan aturan yang berkaitan dengan pajak, namun tindakan ini masih dalam koridor hukum yang berlaku. Perbedaan penggelapan pajak (*tax evasion*) serta penghindaran pajak ada pada sisi legalitasnya. Penghindaran pajak menggunakan strategi yang sah berdasarkan regulasi yang berlaku, sedangkan penggelapan pajak melibatkan manipulasi data keuangan yang melanggar hukum (Hanlon & Heitzman, 2010).

### **Profitabilitas**

Profitabilitas ialah ukuran yang menunjukkan sejauh mana perusahaan mampu mendapatkan keuntungan dari aktivitas operasionalnya. Rasio ini sering kali dipergunakan sebagai alat ukur utama untuk menilai performa finansial perusahaan dan menjadi pertimbangan penting bagi investor, kreditor, serta pihak-pihak terkait lainnya dalam mengambil keputusan. Brigham & Houston (2019) menyatakan bahwa profitabilitas pada umumnya diukur menggunakan berbagai *ratio* keuangan, diantaranya *NPM*, *ROE*, dan *ROA*.

### **Kebijakan Dividen**

Kebijakan dividen adalah ketentuan badan usaha dalam memutuskan porsi keuntungan yang akan disalurkan dalam bentuk dividen kepada pemegang saham serta porsi yang tidak dibagikan dan digunakan untuk investasi ke depan. Ketentuan ini mencerminkan stabilitas keuangan perusahaan dan dapat memengaruhi strategi perpajakan. Lintner (1956) menyatakan perusahaan yang menerapkan kebijakan dividen yang konsisten umumnya mencerminkan pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan terstruktur, sehingga cenderung lebih patuh terhadap kewajiban perpajakan. Sebaliknya, perusahaan yang menahan keuntungan dengan jumlah besar biasanya memiliki ruang yang lebih luas untuk melakukan perencanaan pajak yang lebih proaktif dalam upaya menekan beban pajak.

### **Komisaris Independen**

Komisaris independen ialah pihak yang tidak memiliki keterkaitan dengan pemilik saham dominan, tidak berafiliasi dengan dewan komisaris maupun direksi, serta tidak menduduki jabatan direktur di perusahaan lain yang memiliki hubungan dengan perusahaan tersebut (Sandy & Lukviarman, 2015). Komisaris independen memiliki peran sebagai pengawas kebijakan dan performa manajemen agar tetap berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, serta akuntabilitas. Keberadaan komisaris independen dianggap mampu menurunkan praktik penghindaran pajak, karena fungsi pengawasannya dapat menekan tindakan oportunistik manajemen dalam memanipulasi laba atau melakukan perencanaan pajak agresif.

### **Kualitas Audit Eksternal**

Kualitas audit eksternal berkontribusi penting dalam menjamin keandalan laporan keuangan perusahaan serta kesesuaiannya dengan pedoman akuntansi yang ditetapkan secara umum. Di samping itu, transparansi kepada pemegang saham dapat diwujudkan melalui penyampaian informasi terkait perpajakan, baik dalam rapat pemegang saham maupun di pasar modal (Sandy & Lukviarman, 2015). Kualitas audit yang baik mampu membatasi kesempatan bagi manajemen untuk menjalankan praktik menghindari pajak, karena auditor eksternal yang independen dan bereputasi tinggi cenderung melakukan pemeriksaan lebih ketat terhadap transaksi yang berpotensi menurunkan kewajiban pajak secara tidak wajar.

### **Komite Audit**

Sebagai bagian dari *corporate governance*, komite audit mempunyai peranan penting dalam menunjang dewan komisaris guna mengawasi kepatuhan pada peraturan yang berlaku, pelaporan keuangan, serta sistem pengendalian internal. Secara umum, komite audit bertanggung jawab dalam mengawasi pembuatan laporan keuangan serta pelaksanaan pengendalian internal perusahaan. Selain itu, BEI juga mensyaratkan setiap perusahaan terbuka mempunyai komite audit dengan ketua komisaris independen (Sandy & Lukviarman, 2015).

## **Pengembangan Hipotesis**

### **Implikasi Profitabilitas pada Penghindaran Pajak**

Profitabilitas menggambarkan keahlian badan usaha dalam menciptakan keuntungan. Badan usaha atau korporasi yang profitabilitasnya tinggi cenderung mempunyai sumberdaya yang lebih banyak serta peluang luas untuk menerapkan strategi penghindaran pajak guna melakukan efisiensi pajak (Rego, 2003). Menurut (Hadiwibowo et al., 2023) profitabilitas mempengaruhi secara positif pada praktik menghindari pajak di perusahaan sub-sektor minuman serta makanan yang tercatat di BEI. Atas dasar landasan teori serta hasil studi terdahulu, hipotesis pada studi ini ialah:

H<sub>1</sub>: Profitabilitas berpengaruh pada penghindaran pajak di perusahaan sektor pertambangan di Indonesia.

### **Implikasi Kebijakan Dividen pada Penghindaran Pajak**

Kebijakan dividen ialah penentuan perusahaan terkait pembagian keuntungan kepada pemilik saham atau menahan laba untuk reinvestasi. Menurut (Kuswanto, 2023), terdapat hubungan diantara kebijakan dividen dan praktik penghindaran pajak di BUMN yang ada di Indonesia. Perusahaan dengan dividen tinggi mempunyai transparansi yang lebih optimal dalam pelaporan keuangan serta cenderung berhati-hati dalam strategi perpajakannya (Desai & Dharmapala, 2006). Sebaliknya, badan usaha yang menahan keuntungan dengan jumlah tinggi mempunyai lebih banyak fleksibilitas untuk menjalankan upaya menghindari pajak untuk mengoptimalkan susunan keuangan mereka. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan adalah:

H<sub>2</sub>: Kebijakan dividen berpengaruh pada penghindaran pajak di perusahaan sektor pertambangan di Indonesia.

### **Implikasi Komisaris Independen pada Penghindaran Pajak**

Komisaris independen berfungsi sebagai pengawas performa manajemen agar setiap kebijakan yang diambil tetap mengikuti asas atau kaidah tata pengelolaan perusahaan yang baik. Studi oleh (Ayem & Virdawati, 2024) menunjukkan bahwa komisaris independen mempengaruhi praktik penghindaran pajak. Selain itu, (Nanditama & Ardiyanto, 2021) menyatakan bahwa komisaris independen berperan dalam menyusun strategi jangka panjang perusahaan, melakukan evaluasi atas pelaksanaannya, dan menekan praktik *tax avoidance*. Dengan adanya komisaris independen, diharapkan praktik penghindaran pajak yang berpotensi merugikan negara maupun pemilik saham dapat diminimalkan. Besarnya proporsi komisaris independen dalam dewan komisaris berpotensi meningkatkan efektivitas pengawasan atas kebijakan perpajakan, sehingga kecenderungan penghindaran pajak dapat dikurangi. Maka dari itu, hipotesis studi ini ialah:

H<sub>3</sub>: Komisaris independen berpengaruh pada penghindaran pajak di perusahaan sektor pertambangan di Indonesia.

### **Implikasi Kualitas Audit Eksternal pada Penghindaran Pajak**

Kualitas audit eksternal menunjukkan kemampuan auditor independen dalam menemukan dan mengungkap adanya kesalahan material maupun rekayasa dalam catatan keuangan perusahaan. Audit yang berkualitas akan menumbuhkan kepercayaan terhadap catatan keuangan dan mendorong perusahaan untuk lebih patuh terhadap ketentuan

perpajakan. Menurut (Ananda & Siahaan, 2024), kualitas audit eksternal ialah salah satu determinan yang juga berpengaruh pada praktik penghindaran pajak di perusahaan sektor manufaktur yang ada di Indonesia. Di sisi lain, (Meilinda & Indriani, 2024) juga menyatakan bahwa semakin baik tingkat ketelitian dan pengawasan dalam tata kelola finansial perusahaan, maka akan memberi manfaat positif, termasuk mengurangi kemungkinan terjadinya praktik menghindari pajak. Maka, hipotesis yang peneliti ajukan ialah:

H<sub>4</sub>: Kualitas audit eksternal berpengaruh pada penghindaran pajak di perusahaan sektor pertambangan di Indonesia.

### **Pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak**

Komite audit memiliki tanggung jawab guna menjamin badan usaha menjalankan kegiatan operasionalnya selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bertindak secara etis, dan menjalankan pengawasan terhadap potensi konflik kepentingan dan tindakan-tindakan kecurangan oleh pihak internal perusahaan (Michaelson & Yuniarwati, 2023). Studi oleh (Hidayat & Kurniawan, 2024) memperlihatkan, komite audit merupakan salah satu determinan yang berkaitan dengan praktik menghindari pajak di perusahaan publik di Indonesia. Komite audit dengan konerja yang baik diyakini mampu menekan praktik menghindari pajak pada tingkat agresivitas yang tinggi. Di samping itu, adanya komite audit yang kompeten dan independen mampu memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaporan pajak, meningkatkan transparansi, serta mengurangi kemungkinan terjadinya manipulasi yang dapat menurunkan tingkat kepatuhan pajak. Oleh karena itu, studi ini mengajukan hipotesis berupa:

H<sub>5</sub>: Komite audit berpengaruh pada penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan di Indonesia.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis kuantitatif dengan memanfaatkan data yang bersifat sekunder sebagai sumber utama. Data sekunder yang dipergunakan ini didapat dari dokumen keuangan tahunan perusahaan yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut didapatkan dengan mengakses situs BEI ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)) dan situs website tiap-tiap perusahaan yang menjadi sampel studi, sehingga data yang dipergunakan lebih terstruktur dan telah terverifikasi.

Seluruh perusahaan sektor pertambangan yang tercatat di BEI sepanjang 2021–2024 dipergunakan sebagai populasi dalam studi ini. Langkah penentuan sampel ialah dengan metode *purposive sampling*. Adapun karakteristik sampel dalam studi ini yakni: a) perusahaan sektor pertambangan yang tercatat di BEI selama tahun 2021–2024, b) perusahaan yang menghasilkan laba dan membagikan dividen sepanjang 2021-2024, serta c) perusahaan yang memiliki kelengkapan laporan keuangan dan laporan tahunan sepanjang 2021–2024.

### **Definisi Operasional Variabel**

#### **Variabel Dependen**

Variabel yang dipengaruhi (terikat) pada studi ini ialah penghindaran pajak. Pengukuran variabel penghindaran pajak mempergunakan ETR atau *Effective Tax Rate*, yaitu *ratio* yang menunjukkan komparasi antara beban pajak penghasilan dengan keuntungan yang diperoleh pra pajak. Pengukuran ini didasarkan pada studi terdahulu oleh Hanlon & Heitzman (2010) , rumus perhitungannya:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Nilai ETR yang semakin rendah mengindikasikan bahwa praktik penghindaran pajak perusahaan semakin tinggi (Dyrenge et al., 2008).

### Variabel Independen

#### Profitabilitas

Profitabilitas adalah indikator yang memperlihatkan keahlian perusahaan untuk menciptakan laba melalui aset yang dikelola. Mengacu pada penelitian (M. D. R. Saputra & Asyik, 2017) profitabilitas diukur menggunakan rumus ROA:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Asset}}$$

ROA yang lebih tinggi menunjukkan efektivitas badan usaha dalam mengoperasikan aset untuk menciptakan keuntungan. Pada umumnya, badan usaha dengan profitabilitas besar mempunyai peluang lebih tinggi untuk menghindari pajak guna meningkatkan keuntungan bersih yang diterima pemilik saham (Frank et al., 2009).

#### Kebijakan Dividen

Kebijakan dividen menggambarkan penentuan korporasi dalam memutuskan keuntungan akan dibagikan kepada pemegang saham atau disimpan guna reinvestasi. Berdasarkan penelitian (Irmansyah & Nariman, 2024) kebijakan dividen dinilai dengan rumus DPR atau *Dividend Payout Ratio*, yaitu komparasi dividen tunai dan net laba:

$$DPR = \frac{\text{Dividen Tunai}}{\text{Laba Bersih}}$$

Nilai DPR yang semakin tinggi mengindikasikan semakin besar bagian laba yang dibagi kepada pemegang saham. Perusahaan dengan pembagian dividen yang lebih besar umumnya mempunyai kecenderungan lebih rendah dalam menghindari pajak, akibat berkurangnya porsi laba ditahan yang dapat dioptimalkan melalui strategi perpajakan (Desai & Dharmapala, 2006).

#### Komisaris Independen

Komisaris independen ialah bagian dari dewan komisaris yang datang dari eksternal perusahaan. Pihak ini tidak mempunyai afiliasi kepentingan dengan perusahaan, maka dari itu dapat melakukan peran *monitoring* tanpa bias atau netral dalam menilai performa korporasi secara menyeluruh. Berdasarkan studi (Mulyani et al., 2018) rumus komisaris independen adalah:

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{Total Komisaris Independen}}{\text{Total Dewan Komisaris}}$$

#### Kualitas Audit Eksternal

Menurut (Tahilia et al., 2022) keberadaan auditor diperlukan untuk mendukung kelancaran proses pelaporan keuangan perusahaan. Hal ini disebabkan karena semakin terpisahnya fungsi pengelolaan perusahaan dari kepemilikannya. Hasil audit terhadap laporan keuangan

juga dapat menjadi dasar dalam menilai adanya praktik menghindari pajak oleh perusahaan. Mengacu pada studi (Meilinda & Indriani, 2024) rumus dummy sebagai berikut:

1 = Auditor Eksternal Big 4 (Deloitte, PwC, EY, KPMG)

0 = Auditor Eksternal non Big 4

### Komite Audit

Komite audit ialah elemen struktur tata kelola korporasi yang mempunyai peran utama sebagai pengawas terhadap proses pengungkapan laporan keuangan, memastikan efektivitas pengendalian internal, serta memantau kepatuhan perusahaan pada berbagai peraturan yang berlaku, termasuk di bidang perpajakan. Berdasarkan studi (Meilinda & Indriani, 2024) rumus komite audit adalah:

$$\Sigma = \text{Frekuensi Rapat Komite Audit.}$$

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisa Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif pada penelitian ini digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data pada masing-masing variabel penelitian yang meliputi nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 Temuan Analisis Data Deskriptif

	N	Minimal	Maksimal	Rerata	Std-Deviation
Profitabilitas	41	0.072	0.616	0.26449	0.161678
Kebijakan Dividen	41	0.000	3.576	0.58427	0.628933
Komisaris Independen	41	0.300	0.600	0.41330	0.086537
Kualitas Audit Eksternal	41	0.000	1.000	0.53659	0.504854
Komite Audit	41	4.000	45.000	12.04878	10.947491
Penghindaran Pajak	41	0.038	0.417	0.21341	0.072642

Sumber: Olah Data SPSS, 2026

Berdasarkan tabel 1 temuan analisis memperlihatkan jumlah sampel yang digunakan dalam studi ialah 41 sampel. Variabel profitabilitas yang diukur melalui *Return on Assets* (ROA) memiliki angka minimal yakni 0,072 dan angka maksimal yakni 0,616, standar deviasi 0,161678 serta angka rerata sebesar 0,26449. Kebijakan dividen memperlihatkan angka minimum 0,000 dan nilai maksimal 3,576, dengan standar deviasi 0,628933 dan rerata 0,58427. Selanjutnya, variabel komisaris independen mempunyai angka minimal 0,300 serta maksimal 0,600, standar deviasi 0,086537 dan rerata sebesar 0,41330. Kualitas audit eksternal yang diukur mempergunakan variabel dummy memiliki angka minimal 0,00000 dan maksimal yakni 1,00000. Standar deviasi variabel ini ialah 0,504854 dengan nilai rata-rata 0,53659. Untuk variabel komite audit, angka minimal tercatat sebesar 4,000 dan maksimal 45,000, dengan standar deviasi 10,947491 serta rata-rata sebesar 12,04878. Sementara itu, variabel penghindaran pajak memiliki angka minimal 0,038 dan maksimal 0,417, dengan standar deviasi yakni 0,072642 serta rata-rata yakni 0,21341.

### Uji Asumsi Klasik

#### Uji Normalitas

*One Sample Kolmogorov–Smirnov* dipergunakan dalam uji normalitas studi ini. Data dikatakan memenuhi asumsi normalitas jika angka signifikansi yang diperoleh  $> 0,05$  (5%). Hasil uji normalitas pada penelitian ini disajikan pada Tabel 2 yang bertujuan untuk mengetahui apakah data penelitian terdistribusi secara normal sebagai salah satu syarat dalam analisis regresi.

Tabel 2 Hasil Uji Normalitas

	Unstandardized Residual
N	41
Test Statistic	0,131
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,076

Sumber: Olah Data SPSS, 2026

Dari uji di atas, didapatkan angka Asymp. Sig (2-tailed) yakni  $0,076 > 0,05$ . Temuan ini memperlihatkan bahwa semua data dalam studi ini dapat dinyatakan berdistribusi secara normal.

### Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas studi ini dilaksanakan dengan cara memantau angka VIF atau *Variance Inflation Factor* dan angka *tolerance*. Model studi ini dapat dikatakan tidak mengalami gejala multikolinearitas jika  $VIF < 10$  dan  $tolerance < 0,1$ . Hasil uji multikolinieritas pada penelitian ini disajikan pada Tabel 3 yang menunjukkan nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF) pada masing-masing variabel penelitian.

Tabel 3 Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Profitabilitas	0,829	1,207	bebas dari multikolinieritas
Kebijakan Dividen	0,983	1,017	bebas dari multikolinieritas
Komisaris Independen	0,754	1,326	bebas dari multikolinieritas
Kualitas Audit Eksternal	0,865	1,156	bebas dari multikolinieritas
Komite Audit	0,637	1,569	bebas dari multikolinieritas

Sumber: Olah Data SPSS, 2026

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas pada Tabel 3, seluruh variabel independen dalam penelitian ini menunjukkan nilai VIF di bawah 10 dan nilai tolerance di atas 0,1. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terdapat hubungan linear yang tinggi antar variabel independen, sehingga model regresi dinyatakan bebas dari gejala multikolinieritas. Dengan demikian, variabel profitabilitas, kebijakan dividen, komisaris independen, kualitas audit eksternal, dan komite audit dapat digunakan secara bersama-sama dalam model tanpa menimbulkan distorsi pada estimasi, sehingga hasil analisis regresi yang diperoleh dapat dipercaya dan memiliki tingkat keakuratan yang baik.

### Uji Heteroskedastisitas

Metode *Glejser Test* digunakan dalam uji heteroskedastisitas pada studi ini. Tidak adanya heteroskedastisitas ditunjukkan oleh angka sig. yang lebih besar daripada 0,05. Untuk mengetahui apakah model regresi mengalami gejala heteroskedastisitas, dilakukan pengujian yang hasilnya dapat dilihat pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Hasil Uji Heterokedastistas

Variabel	Sig.	Keterangan
Profitabilitas	0,223	Model terbebas dari gejala heteroskedastisitas

Kebijakan Dividen	0,053	Model terbebas dari gejala heteroskedastisitas
Komisaris Independen	0,685	Model terbebas dari gejala heteroskedastisitas
Kualitas Audit Eksternal	0,281	Model terbebas dari gejala heteroskedastisitas
Komite Audit	0,364	Model terbebas dari gejala heteroskedastisitas

Sumber: Olah Data SPSS, 2026

Temuan uji Glejser yang disajikan memperlihatkan bahwa seluruh variabel mempunyai angka signifikansi  $> 0,05$ , maka dari itu model penelitian bebas dari masalah heteroskedastisitas.

### Uji Autokorelasi

Untuk memastikan bahwa model regresi terbebas dari gejala autokorelasi, penelitian ini melakukan uji autokorelasi menggunakan pendekatan Durbin-Watson. Hasil pengujian tersebut disajikan pada Tabel 5 berikut.

Tabel 5 Temuan Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,531	0,282	0,180	0,065796	1,881

Sumber: Olah Data SPSS, 2026

Berdasarkan output, angka DW yakni 1,881 sedangkan angka DU diketahui 1,7835. Hasil penelitian ini menunjukkan angka berada diantara  $1,7835 < 1,881 < 4 - 1,7835$  atau  $1,7835 < 1,881 < 2,217$ , sehingga dapat ditarik simpulan bahwa semua variabel tidak mengalami autokorelasi.

### Uji Hipotesis

#### Analisa Regresi Linear Berganda

Hasil pengujian regresi linier berganda yang menunjukkan pengaruh profitabilitas, kebijakan dividen, komisaris independen, kualitas audit eksternal, dan komite audit terhadap variabel dependen disajikan pada Tabel 6 berikut.

Tabel 6. Hasil Uji Analisis Linier Berganda

Keterangan	Unstandardized-Coefficients		Standardized Coefficients			Ket.
	B	Std-Error	Beta	t	Sig.	
(Konstan)	0,285	0,059		4,869	0,000	
Profitabilitas	0,098	0,071	0,218	1,385	0,175	H <sub>1</sub> ditolak
Kebijakan Dividen	0,039	0,017	0,338	2,343	0,025	H <sub>2</sub> diterima
Komisaris Independen	-0,347	0,138	-0,413	-2,504	0,017	H <sub>3</sub> diterima
Kualitas Audit Eksternal	-0,006	0,022	-0,042	-0,272	0,787	H <sub>4</sub> ditolak
Komite Audit	0,002	0,001	0,325	1,810	0,079	H <sub>5</sub> ditolak
F <sub>stat</sub>	2,751					
F <sub>sig</sub>					0,034 <sup>b</sup>	
R <sup>2</sup>	0,282					
AdjR <sup>2</sup>	0,180					

Sumber: Olah Data SPSS, 2026

Mengacu pada tabel di atas, didapatkan fungsi regresi berikut:

$$PP = 0,285 + 0,098 \text{ PRO} + 0,039 \text{ KD} - 0,347 \text{ KI} - 0,006 \text{ KAE} + 0,002 \text{ KA} + \varepsilon$$

Mengacu pada temuan analisa regresi linier berganda, arah koefisien regresi dalam studi ini dapat dijelaskan dengan asumsi bahwa variabel profitabilitas, kebijakan dividen, komisaris independen, kualitas audit eksternal, dan komite audit berada dalam kondisi konstan atau bernilai nol. Koefisien regresi pada variabel profitabilitas memperlihatkan adanya peningkatan profitabilitas akan diikuti dengan meningkatnya tingkat menghindari pajak. Begitu juga sebaliknya, jika profitabilitas menurun, maka tingkat penghindaran pajak juga cenderung menurun. Pada variabel kebijakan dividen, hasil regresi memperlihatkan semakin tinggi kebijakan dividen, maka tingkat penghindaran pajak juga cenderung meningkat. Kemudian, semakin rendah kebijakan dividen, maka penghindaran pajak juga akan menurun. Sementara itu, koefisien regresi pada variabel komisaris independen memperlihatkan hubungan yang berlawanan, di mana peningkatan jumlah komisaris independen akan menurunkan tingkat penghindaran pajak. Sebaliknya, apabila jumlah komisaris independen lebih sedikit, penghindaran pajak cenderung meningkat. Untuk variabel kualitas audit eksternal, perusahaan yang mendapat audit dari Kantor Akuntan Publik (KAP) yang termasuk dalam Big 4 cenderung mempunyai tingkat menghindari pajak yang lebih rendah dibanding dengan perusahaan yang mendapat audit oleh KAP non-Big 4. Adapun pada variabel komite audit, hasil regresi menunjukkan bahwa semakin besar jumlah komite audit, tingkat untuk menghindari pajak cenderung meningkat. Begitu juga sebaliknya, apabila total komite audit lebih sedikit, perilaku menghindari pajak juga akan lebih rendah.

Berdasarkan hasil Tabel 6, uji kelayakan model (uji F) menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,034 ( $< 0,05$ ), sehingga model regresi dinyatakan layak dan seluruh variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan. Selanjutnya, nilai koefisien determinasi (Adjusted  $R^2$ ) sebesar 0,180 mengindikasikan bahwa variabel kebijakan dividen, profitabilitas, kualitas audit eksternal, komite audit, dan komisaris independen mampu menjelaskan sebesar 18% variasi penghindaran pajak, sementara sisanya 82% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model. Hasil uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan (sig. 0,175  $> 0,05$ ), sedangkan kebijakan dividen (sig. 0,025  $< 0,05$ ) dan komisaris independen (sig. 0,017  $< 0,05$ ) berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sementara itu, kualitas audit eksternal (sig. 0,787  $> 0,05$ ) dan komite audit (sig. 0,079  $> 0,05$ ) tidak berpengaruh signifikan, sehingga hipotesis  $H_1$  ditolak,  $H_2$  dan  $H_3$  diterima, serta  $H_4$  dan  $H_5$  ditolak.

## **Pembahasan**

### **Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak**

Hipotesis satu ( $H_1$ ) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sehingga dapat dikatakan bahwa Hipotesis satu ( $H_1$ ) ditolak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa tingginya laba yang diperoleh perusahaan tidak selalu mendorong manajemen untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Hal ini berarti bahwa meskipun perusahaan menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi (profitabilitas yang lebih tinggi), hal tersebut tidak memengaruhi kecenderungan perusahaan untuk menghindari pajak.

Perusahaan dengan profitabilitas tinggi belum tentu memiliki financial yang kuat untuk menekan beban pajak, karena beban pajak yang tinggi dapat diterima sebagai konsekuensi dari kinerja keuangan yang baik. Selain itu, perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas

tinggi umumnya menjadi sorotan publik dan otoritas pajak, sehingga cenderung mengurangi risiko terhadap tindakan yang dapat memengaruhi reputasi dan kepatuhan pajaknya. Temuan ini konsisten dengan penelitian (Handayani & Mildawati, 2018), (Subagiastra et al., 2016), dan (Herawati & Bandi, 2019b) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

### **Pengaruh Kebijakan Dividen Terhadap Penghindaran Pajak**

Hipotesis dua ( $H_2$ ) menyatakan bahwa kebijakan dividen berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan dividen berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, sehingga dapat dikatakan bahwa Hipotesis dua ( $H_2$ ) diterima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan dividen berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa ketika perusahaan meningkatkan jumlah dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham, ada kemungkinan perusahaan tersebut akan cenderung lebih banyak melakukan penghindaran pajak. Perusahaan akan memaksimalkan laba yang tersedia untuk dibagikan kepada pemegang saham, sehingga perusahaan berusaha menekan beban pajak untuk mempertahankan tingkat dividen yang menguntungkan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian (Lestari, 2023) yang menyatakan bahwa kebijakan dividen berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

### **Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak**

Hipotesis tiga ( $H_3$ ) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, sehingga dapat dikatakan bahwa Hipotesis tiga ( $H_3$ ) diterima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Artinya bahwa semakin banyak komisaris independen yang ada dalam dewan komisaris perusahaan, maka semakin rendah kemungkinan perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak. Dalam hal ini, keberadaan komisaris independen cenderung mencegah atau mengurangi praktik penghindaran pajak, karena mereka lebih cenderung untuk menjaga integritas dan transparansi dalam pengelolaan perusahaan, termasuk dalam hal kepatuhan pajak.

Dengan adanya pengawasan tersebut, manajemen menjadi lebih berhati-hati dan transparan dalam menetapkan kebijakan pajak Perusahaan. Hasil ini konsisten dengan penelitian (Saputra et al., 2019) yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

### **Pengaruh Kualitas Audit Eksternal Terhadap Penghindaran Pajak**

Hipotesis empat ( $H_4$ ) menyatakan bahwa kualitas audit eksternal berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas audit eksternal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sehingga dapat dikatakan bahwa Hipotesis empat ( $H_4$ ) ditolak. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kualitas audit eksternal yang dilakukan oleh auditor independen tidak memengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Dengan kata lain, meskipun perusahaan menjalani audit eksternal, kualitas audit tersebut tidak secara signifikan mengurangi atau mendorong praktik penghindaran pajak. Meskipun perusahaan diaudit oleh auditor eksternal yang berkualitas, hal tersebut tidak memengaruhi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Secara statistik, ini menunjukkan bahwa kualitas audit eksternal tidak dapat menjelaskan

variasi dalam penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan dalam penelitian ini. Hal ini konsisten dengan penelitian (Putri Simanjuntak & Suranta, 2024) yang menyatakan bahwa kualitas audit eksternal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

### **Pengaruh Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak**

Hipotesis lima ( $H_5$ ) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sehingga dapat dikatakan bahwa Hipotesis lima ( $H_5$ ) ditolak. Penghindaran pajak merupakan strategi legal dalam batas regulasi. Oleh karena itu, meskipun terdapat komite audit yang aktif, praktik tersebut tetap dapat dilakukan selama tidak melanggar hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, artinya keberadaan atau kualitas komite audit dalam perusahaan tidak mempengaruhi keputusan perusahaan untuk menghindari pajak. Hal ini konsisten dengan penelitian (Putri & Estririni, 2025) yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

### **4. CONCLUSION**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan kebijakan dividen berpengaruh positif dan signifikan, serta komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Sementara itu, kualitas audit eksternal dan komite audit tidak terbukti berpengaruh signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa faktor tata kelola seperti komisaris independen lebih efektif dalam menekan praktik penghindaran pajak dibandingkan mekanisme pengawasan lainnya, serta adanya dorongan perusahaan untuk mengoptimalkan laba yang dibagikan melalui dividen dengan menekan beban pajak. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada jumlah variabel yang digunakan yang hanya mampu menjelaskan sebagian kecil variasi penghindaran pajak, serta keterbatasan pada objek penelitian yang berfokus pada sektor pertambangan sehingga membatasi generalisasi hasil. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain seperti ukuran perusahaan, leverage, atau corporate governance lainnya, serta memperluas cakupan sektor dan periode penelitian agar hasil yang diperoleh lebih komprehensif dan memiliki tingkat generalisasi yang lebih tinggi.

### **5. ACKNOWLEDGMENT**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Ibu Mujiyati selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan dukungan selama proses penyusunan penelitian ini. Selain itu, penulis mengapresiasi Universitas Muhammadiyah Surakarta, khususnya Program Studi Akuntansi, atas fasilitas dan lingkungan akademik yang mendukung. Tidak lupa, terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.

### **6. AUTHORS' NOTE**

The authors declare that there is no conflict of interest regarding the publication of this article. Authors confirmed that the paper was free of plagiarism.

## 5. REFERENCES

- Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis. *Journal Of Public Economics*, 1(3–4), 323–338.
- Ananda, P. Della, & Siahaan, M. (2024). Tax Avoidance Affected By Audit Quality And Company Factors. *Media Bisnis*, 16(2), 235–248. [Http://Jurnaltsm.id/Index.Php/Mb](http://Jurnaltsm.id/Index.Php/Mb)
- Ayem, S., & Virdawati. (2024). Exploring The Impact Of Independent Commissioners, Institutional Ownership, Profitability, And Leverage On Tax Avoidance. *International Journal Of Economics Development Research*, 5(3), 2024–1746.
- Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2006). Corporate Tax Avoidance And High-Powered Incentives. *Journal Of Financial Economics*, 79(1), 145–179.
- Dyreng, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2008). Long-Run Corporate Tax Avoidance. *The Accounting Review*, 83(1), 61–82.
- Frank, M. M., Lynch, L. J., & Rego, S. O. (2009). Tax Reporting Aggressiveness And Its Relation To Aggressive Financial Reporting. *The Accounting Review*, 84(2), 467–496.
- Hadiwibowo, I., Maeti, Aziz, M. T., & Jufri, A. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Manajemen Laba, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 12(1).
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A Review Of Tax Research. *Journal Of Accounting And Economics*, 50(2–3), 127–178.
- Hidayat, M., & Kurniawan, R. (2024). Accounting And Bussiness Journal The Influence Of Profitability, Leverage, Capital Intensity And Audit Committee On Tax Avoidance (Study Of Universitas Andalas Accounting Students). *Accounting And Bussiness Journal*, 6(1).
- Irmansyah, D., & Nariman, A. (2024). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dividend Payout Ratio Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, 6(1), 53–63.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1919). Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure. In *Corporate Governance* (Pp. 77–132). Gower.
- Kuswanto, R. (2023). Tax Avoidance And Dividend Policy: Evidence From Indonesian State-Owned Enterprises. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 10(2), 199–212. <https://doi.org/10.24815/Jdab.V10i2.30037>
- Lestari, A. I., & Djohar, C. (2023). Pemoderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Food Dan Beverage Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021). 3(2). <https://doi.org/10.46306/Rev.V3i2>
- Lestari, N. (2023). Pengaruh Kebijakan Dividen, Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Pertanian Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2017-2021. *Jurnal Literasi Akuntansi*.
- Meilinda, A., & Indriani, P. (2024). Pengaruh Leverage, Komite Audit Dan Kualitas Audit Eksternal Terhadap Penghindaran Pajak. *Ekonomis: Journal Of Economics And Business*, 8(1), 677–684.

- Michaelsan, M., & Yuniarwati, Y. (2023). Pengaruh Komite Audit, Komisaris Independen, Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode 2018-2020. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 5(3), 1499–1509.
- Mulyani, S., Wijayanti, A., & Masitoh, E. (2018). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bei). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 3(1), 322–340.
- Nanditama, T. A., & Ardiyanto, Moch. D. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2019). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 10, 1–14. [Http://Ejournal-S1.Undip.Ac.Id/Index.Php/Accounting](http://Ejournal-S1.Undip.Ac.Id/Index.Php/Accounting)
- Nuryanasari, E. P., & Fauzan. (2025). Peran Good Corporate Governance Dalam Pengendalian Manajemen Laba: Studi Pada Perusahaan Sektor Basic Materials Di Bursa Efek Indonesia. *Edunomika*, 9(2).
- Purnomo, H., & Eriandani, R. (2022). Pengaruh Efektivitas Komite Audit Dan Penghindaran Pajak: Peran Moderasi Kualitas Audit. *Jurnal Akuntansi*, 32(7), 1743–1756. <https://doi.org/10.24843/Eja.2022.V>
- Putri, N. M., & Estririni, D. H. (2025). Penghindaran Pajak: Peran Komite Audit, Dampak Financial Distress, Dan Moderasi Kualitas Audit. *Costing: Journal Of Economic, Business And Accounting*, 8(2), 1943–1953.
- Putri Simanjuntak, E., & Suranta, E. (2024). Pengaruh Financial Distress Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak : Covid 19 Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmiah Mea (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 8(1), 117.
- Rego, S. O. (2003). Tax-Avoidance Activities Of Us Multinational Corporations. *Contemporary Accounting Research*, 20(4), 805–833.
- Sandy, S., & Lukviarman, N. (2015). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance: Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 19(2), 85–98. <https://doi.org/10.20885/Jaai.Vol19.Iss2.Art1>
- Saputra, M. D. R., & Asyik, N. F. (2017). Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (Jira)*, 6(8).
- Saputra, M. D., Susanti, J., & Istiarto, I. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga Dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Di Indonesia. *Valid: Jurnal Ilmiah*, 16(2), 164–179.
- Sulaiman, N., & Yusuf, H. (2024). Strategi Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan Di Indonesia: Studi Tentang Penghindaran Dan Penggelapan Pajak. *Jiic: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, Vol : 1 No: 9.
- Tahilia, A., Sulistyowati, S., & Wasif, S. K. (2022). Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Dan Konservatisme Akuntansi Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 19(02), 49–62.
- Tanjaya, C., & Nazir, N. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur

Sektor Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2015-2019. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 8(2), 189–208. <https://doi.org/10.25105/jat.v8i2.9260>

Wulandari, S., & Stiawan, H. (2023). *Accounting Information System, Taxes, And Auditing*.  
Www.Kemenkeu.Go.Id